

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2020**  
**(Belanja Langsung)**  
**s/d Bulan Juni**  
**BIRO TATA PEMERINTAHAN**

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisas	Deviasi	Target (Rp)	Target	Realisasi (Rp)	Realisasi					Deviasi
1	0.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	494.074.000	71,18	71,18	0,00	326.189.000	66,02	215.529.630	43,62	22,40				
1.1	0.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	162.240.000	52,80	52,80	0,00	80.959.000	49,90	77.206.350	47,59	2,31	DIY	-	<p>6. Jasa Surat-menyurat : 3 Jenis dari 3 Jenis</p> <p>8. Penggandaan : 39459 Lembar dari 80000 Lembar</p> <p>2.Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan : 2 Jenis dari 3</p> <p>1. Alat Tulis Kantor : 30 jenis dari 37 jenis</p> <p>7. Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor : 5 Jenis</p> <p>3. Barang Cetakn : 0 Jenis dari 16 Jenis</p> <p>4. Bukti Pembayaran Pajak/ STNK Kendaraan Dinas/ Operasional Roda Dua : 0 Unit dari 7 Unit</p> <p>5. Bukti Pembayaran Pajak/ STNK Kendaraan Dinas/ Operasional Roda Empat : 0 Unit dari 5 Unit</p> <p>9. Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran : 0 Tabung dari 11 Tabung</p> <p>10. Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih : 8 Jenis dari 15 Jenis</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Penyediaan peralatan tulis kantor</p> <p>2. Penyediaan peralatan kebersihan</p> <p>3. Tersedianya kelengkapan surat menyurat Perangko, Materai, dan benda pos lainnya</p> <p>4. Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</p> <p>5. Terpeliharanya bangunan gedung tempat kerja</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Telah terinventarisasi kebutuhan dan jadwal pelaksanaan kegiatan 2. SDM yang berkompeten</p>
1.2	0.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	132.960.000	55,00	55,00	0,00	69.480.000	52,26	61.590.000	46,32	5,93	DIY	-	<p>4. Kinerja 1 Orang Fasilitasi Kepegawaian : 0.5 Tahun dari 1 Tahun</p> <p>5. Kinerja 2 Orang Pengemudi : 0.5 Tahun dari 1 Tahun</p> <p>1. Kinerja 1 Orang Perencana Program : 0.5 Tahun dari 1 Tahun</p> <p>6. Kinerja 9 Orang Pengelola Keuangan : 0.5 Tahun dari 1 Tahun</p> <p>2. Kinerja 2 Orang Pengelola Barang : 0.5 Tahun dari 1 Tahun</p> <p>3. Kinerja 1 Orang Caraka : 0.5 Tahun dari 1 Tahun</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. belanja pegawai</p> <p>2. pengadaan barang dan jasa</p> <p>3. pengadaan jasa kantor</p> <p>4. Kinerja pengelola keuangan sampai dengan Bulan Juni</p> <p>5. Kinerja pengelola kepegawaian sampai dengan Bulan Juni</p> <p>6. Kinerja caraka sampai dengan Bulan Juni</p> <p>7. Kinerja pengemudi sampai dengan Bulan Juni</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Adanya rasionalisasi anggaran sehingga anggaran yang dikelola Biro Tata Pemerintahan Setda DIY berkurang, pembayaran honorarium pengelola keuangan disesuaikan dengan Anggaran yang dikelola besarnya sesuai dengan SHBI</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Kinerja seluruh pegawai yang penuh tanggungjawab</p>
1.3	0.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	198.874.000	97,00	97,00	0,00	175.750.000	88,37	76.733.280	38,58	49,79	DIY	-	<p>1. Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah : 0.5 Tahun dari 1 Tahun</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p>

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2020**  
**(Belanja Langsung)**  
**s/d Bulan Juni**  
**BIRO TATA PEMERINTAHAN**

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisas	Deviasi	Target (Rp)	Target	Realisasi (Rp)	Realisasi	Deviasi				
														2. Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah : 0.5 Tahun dari 1 Tahun 3. Makanan dan Minuman untuk Rapat Koordinas : 0.5 Tahun dari 1 Tahun	1. Tersedianya makanan dan minuman rapat sampai dengan Bulan Juni 2. Terlaksananya koordinasi dan konsultasi sampai dengan Bulan Juni <b>Faktor Penghambat:</b> Adanya kejadian luar biasa virus yang menjadi pandemi seluruh dunia membuat penyerapan koordinasi dan konsultasi luar daerah tidak maksimal(Sisa anggaran kas Triwulan I) <b>Faktor Pendukung:</b> Anggaran Kas yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan
2	0.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	260.009.500	85,29	85,29	0,00	219.330.000	84,35	180.072.000	69,26	15,10				
2.1	0.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	145.850.000	100,00	100,00	0,00	145.850.000	100,00	129.300.000	88,65	11,35	DIY	-	2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor sesuai RKBMD : 0 Jenis dari 6 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor sesuai RKBMD : 0 Jenis dari 2 Jenis	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. pengadaan barang dan jasa 2. belanja cetak dan penggandaan 3. pengadaan perlengkapan kantor 4. pengadaan komputer 5. pengadaan alat-alat studio 6. pengadaan peralatan penanganan dan pencegahan penularan covid-19 <b>Faktor Penghambat:</b> Sisa pengadaan peralatan perlengkapan kantor sebagai efisiensi. <b>Faktor Pendukung:</b> Pengadaan telah selesai dilaksanakan, ada efisiensi anggaran
2.2	0.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	73.304.500	69,00	69,00	0,00	49.100.000	66,98	33.622.000	45,87	21,11	DIY	-	2. Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional Roda Empat : 0 Unit dari 5 Unit 1. Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional Roda Dua : 0 Unit dari 7 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional Roda Dua sampai dengan Bulan Juni 2. Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional Roda Empat sampai dengan Bulan Juni <b>Faktor Penghambat:</b> 1. Adanya bencana non alam sehingga operasional kendaraan dinas berkurang 2. Penggunaan anggran pemeliharaan disesuaikan dengan kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> Efisiensi bahan bakar minyak dan Pemeliharaan kendaraan disesuaikan dengan waktu pemeliharaan

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2020**  
**(Belanja Langsung)**  
**s/d Bulan Juni**  
**BIRO TATA PEMERINTAHAN**

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target	Realisasi (Rp)	Realisasi	Deviasi				
2.3	0.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	40.855.000	62,00	62,00	0,00	24.380.000	59,67	17.150.000	41,98	17,70	DIY	-	Terpeliharanya Peralatan/ Perlengkapan, Gedung/ Kantor sesuai RKPBMMD : 0 Jenis dari 15 Jenis	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terpeliharanya Peralatan Gedung/ Kantor sesuai RKPBMMD sampai dengan Bulan Juni</li> <li>2. Terpeliharanya Perlengkapan, Gedung/ Kantor sesuai RKPBMMD sampai dengan Bulan Juni</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya bencana non alam sehingga penggunaan peralatan kantor berkurang</li> <li>2. Penggunaan anggaran pemeliharaan disesuaikan dengan kebutuhan</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan disesuaikan dengan kondisi kerusakan</p>
3	0.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	81.376.000	60,40	60,40	0,00	47.281.500	58,10	46.336.250	56,94	1,16				
3.1	0.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	7.325.000	100,00	100,00	0,00	7.325.000	100,00	7.185.000	98,09	1,91	DIY	-	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang Capaian Kinerjanya sesuai dengan Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU) : 83.54 Nilai dari 70 Nilai	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya Laporan Kinerja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2019</li> <li>2. Telah direviu LKJIP Biro Tata Pemerintahan Setda DIY oleh Inspektorat DIY</li> <li>3. Telah dinilai kualitas laporan dengan katagori "A"</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Biaya cetak buku laporan kinerja perangkat daerah "mepet" sehingga hanya bisa cetak beberapa eksemplar saja</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Adanya dukungan dari semua elemen di Biro sehingga Laporan Kinerja bisa selesai disusun</p>
3.2	0.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3.820.000	47,00	47,00	0,00	1.423.250	37,26	1.413.250	37,00	0,26	DIY	-	3. Laporan Realisasi Semesteran dan Prognosis 2020 : 0 Laporan dari 1 2. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu SPJ Belanja Fungsional : 6 Bulan dari 12 1. Laporan Keuangan Tahunan : 1 Laporan dari 1 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Laporan SPJ Fungsional sampai dengan Bulan Maret</li> <li>2. Telah disusun Laporan Keuangan Tahunan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY "unaudited"</li> <li>3. Laporan Keuangan Tahunan masih diperiksa oleh BPK.</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p>

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2020**  
**(Belanja Langsung)**  
**s/d Bulan Juni**  
**BIRO TATA PEMERINTAHAN**

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisas	Deviasi	Target (Rp)	Target	Realisasi (Rp)	Realisasi					Deviasi
														Penyusunan Laporan Keuangan isinya rapat koordinasi dan pembelian alat tulis kantor. Karena ada pandemi Covid-19 maka rapat koordinasi tidak dapat dilakukan dalam satu ruangan. penyusunan laporan dilakukan dengan menggali data mendatangi pelaksana kegiatan dan menggunakan media sosial <b>Faktor Pendukung:</b> Dukungan semua pihak sehingga laporan keuangan dapat selesai dan tepat waktu disusun	
3.3	0.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	64.369.000	58,00	58,00	0,00	35.906.000	55,78	35.208.000	54,70	1,08	DIY	-	4. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2021 : 0 Dokumen dari 1 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021 : 0 Dokumen dari 1 3. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 5. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 2020 : 2 Dokumen dari 1 Dokumen 1. Berita Acara Forum Perencanaan OPD : 1 Berita Acara dari 1 Berita Acara	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 2. Terlaksananya Forum Perangkat Daerah dan penandatanganan BA Forum OPD 3. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 2020 tahap 1 dan tahap 2 <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
3.4	0.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	5.862.000	46,00	46,00	0,00	2.627.250	44,82	2.530.000	43,16	1,66	DIY	-	Realisasi Penggunaan Dana Sesuai Anggaran Kas yang Telah Ditetapkan 9 Program 19 Kegiatan : 0 % dari 95 %	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Rapat pengendalian internal sampai dengan Bulan Juni <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
4	1.12.15	<b>PROGRAM PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	1.052.761.000	57,01	57,01	0,00	646.074.800	61,37	464.986.871	44,17	17,20				
4.1	1.12.15.002	Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	550.200.000	72,00	72,00	0,00	442.630.800	80,45	347.122.635	63,09	17,36	DIY	-	6. KTP-el dan KIA yang Diterbitkan dalam Pelayanan Terpadu : 0 KIA dari 100 KIA 1. Blangko KIA : 20000 Keping dari 20000 Keping 5. Kerja Sama dengan Lembaga Penyedia Jasa/ Layanan Publik untuk Pemberian Insentif : 0 Lembaga dari 10 Lembaga 2. Dokumen Akta Kelahiran bagi Penduduk Miskin/ Marginal : 200 Akta 6. KTP-el dan KIA yang Diterbitkan dalam Pelayanan Terpadu : 200 KTP-el dari 200 KTP-el	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Blangko KIA - Terlaksananya rapat persiapan kegiatan tahun 2020 - Tersedianya Blangko KIA sebanyak 20.000 keping - Terdistribusikanya blangko KIA di Kabupaten Bantul dan Sleman masing-masing 4000 keping

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2020**  
**(Belanja Langsung)**  
**s/d Bulan Juni**  
**BIRO TATA PEMERINTAHAN**

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisas	Deviasi	Target (Rp)	Target	Realisasi (Rp)	Realisasi				
													7. Sosialisasi Perda No. 9 Tahun 2015 : 600 Orang dari 600 Orang  4. Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Adminduk : 0 Dokumen dari 80 Dokumen 3. Dokumen Akta Perkawinan bagi Penduduk Miskin/ Marginal : 0 Akta dari 50 Akta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdistribusikanya blangko KIA di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 4000 keping</li> <li>- Terdistribusikanya blangko KIA di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 4000 keping</li> <li>2. Dokumen Akta Kelahiran bagi Penduduk Miskin/ Marginal               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya rapat persiapan kegiatan tahun 2020</li> <li>- Terbitnya dokumen akta kelahiran bagi penduduk miskin/marginal sebanyak 200 akta di Kabupaten Gunungkidul</li> <li>- Terlaksananya proses verifikasi dan validasi data penduduk miskin/marginal calon penerima akta kelahiran di Desa Bulurejo, Wiladeg, Petir dan Bohol</li> </ul> </li> <li>3. Dokumen Akta Perkawinan bagi Penduduk Miskin/ Marginal               <ul style="list-style-type: none"> <li>- terlaksananya sosialisai pencatatan perkawinan melalui sidang itsbat nikah bagi penduduk marginal di Kabupaten Gunungkidul.</li> <li>- Terlaksananya rapat koordinasi dengan PA Gunungkidul dan Dinas Dukcapil Gunungkidul terkait pelaksanaan sidang itsbat dimasa covid-19</li> <li>- Terlaksananya penyampaian data dan verifikasi terkait data peserta isbat nikah di Kecamatan Saptosari, yaitu di Desa Jetis, Kepek dan Ngloro</li> </ul> </li> <li>4. Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Adminduk               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya rapat persiapan kegiatan tahun 2020</li> </ul> </li> <li>5. Kerja Sama dengan Lembaga Penyedia Jasa/ Layanan Publik untuk Pemberian Insentif               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya rapat persiapan kegiatan tahun 2020</li> <li>- Tersusunya Dokumen PKS (Perjanjian Kerja Sama) dengan stake holder</li> <li>- Telah ditanda tangannya PKS (Perjanjian Kerja Sama) dengan Gembiraloka Zoo terkait pemberian insentif bagi pemegang</li> </ul> </li> </ul>

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2020**  
**(Belanja Langsung)**  
**s/d Bulan Juni**  
**BIRO TATA PEMERINTAHAN**

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisas	Deviasi	Target (Rp)	Target	Realisasi (Rp)	Realisasi					Deviasi
														<p>6. KTP-el dan KIA yang Diterbitkan dalam Pelayanan Terpadu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunya jadwal Pelayanan terpadu pada tahun 2020 sebanyak 5x di Kab/Kota se-DIY masing-masing 1x.</li> <li>- Terlaksananya koordinasi dengan Dinas DUkcapil Kota Yogyakarta terkait rencana pelayanan terpadu pada bulan Februari di Kota Yogyakarta</li> <li>- Terlaksananya Pelayanan Terpadu Rekam cetak KTP-el dan KIA di Kota Yogyakarta pada tanggal 20 - 21 Februari 2020</li> <li>- Terlaksananya pelayanan terpadu rekam cetak KTP-el dan KIA di Kabupaten Bantul pada tanggal 10-11 Maret 2020</li> </ul> <p>7. Sosialisasi Perda No. 9 Tahun 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunya jadwal kegiatan sosialisasi Perda No.9 tahun 2015 di Kabupaten Gunungkidul, Bantul dan Sleman</li> <li>- Terlaksananya sosialisasi Perda no 9 tahun 2015 di Kabupaten Bantul pada tanggal 11 - 12 Februari 2020</li> <li>- - Terlaksananya sosialisasi Perda no 9 tahun 2015 di Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 26 - 27 Februari 2020</li> <li>- Terlaksananya sosialisasi Perda no 9 tahun 2015 di Kabupaten Sleman</li> </ul> <p>8. Dukungan sebesar 61,68% terhadap Presentase Kepemilikan Dokumen Penting adminduk (KTP, akta kelahiran, dan akta kematian)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya koordinasi dengan Dinas Dukcapil Kab/Kota Se-DIY terkait rencana kegiatan di tahun 2020</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Kegiatan pengumpulan massa untuk Pelayanan Terpadu, fasilitasi akta kelahiran dan fasilitasi itsbat nikah tidak dapat dilakukan mulai Bulan April sehingga mengurangi penyerapan anggaran</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> 1. Kerjasama antar pegawai yang solid 2. perencanaan yang matang</p>	
4.2	1.12.15.003	Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	270.525.000	53,73	53,73	0,00	144.798.000	53,52	109.527.736	40,49	13,04	DIY	-	<p>3. Profil Perkembangan Kependudukan 2018 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>1. Instansi yang Mendapatkan Hak Akses Data Kependudukan : 0 Instansi dari 3 Instansi</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Instansi yang Mendapatkan Hak Akses Data Kependudukan</p>

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2020**  
**(Belanja Langsung)**  
**s/d Bulan Juni**  
**BIRO TATA PEMERINTAHAN**

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisas	Deviasi	Target (Rp)	Target	Realisasi (Rp)	Realisasi				
													2. Pengembangan Sistem Informasi Adminduk : 0 Sistem dari 1 Sistem	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya rapat persiapan kegiatan tahun 2020</li> <li>- Terlaksananya koordinasi terkait rencana sosialisasi Prosedur dan tatacara pemanfaatan data kependudukan di DIY</li> <li>- Terlaksananya koordinasi dengan Dinas Dikpora DIY terkait pemanfaatan database kependudukan dalam mensukseskan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru tahun 2020)</li> <li>- Terlaksananya fasilitasi pemanfaatan data kependudukan oleh Dinas Dikpora DIY terkait kegiatan PPDB(Penerimaan Peserta Didik Baru tahun 2020)</li> </ul> <p>2. Pengembangan Sistem Informasi Adminduk</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya koordinasi terkait pengembangan aplikasi pendaftaran pelayanan terpadu/GISA 2020</li> <li>- Terupdatenya sistem informasi pendaftaran Pelayanan terpadu <a href="http://www.gisa.jogjaprovo.go.id">www.gisa.jogjaprovo.go.id</a> dengan penambahan fitur pendaftaran KIA</li> <li>- Terlaksananya koordinasi terkait rencana pengembangan Sistem Informasi Laminduk Online</li> </ul> <p>3. Profil Perkembangan Kependudukan 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya rapat persiapan kegiatan tahun 2019</li> <li>- Terlaksananya koordinasi terkait rencana penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan 2019</li> <li>- Terlaksananya rapat Koordinasi Penyusunan Profile Perkembangan Kependudukan DIY 2019</li> <li>- Tersedianya data penyusunan Profile Perkembangan Kependudukan DIY 2019</li> <li>- Tersedianya data tambahan dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan DIY tahun 2019</li> <li>- Tersusunnya buku Profil Perkembangan Kependudukan DIY tahun 2019</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b>            Acara pengumpulan masa untuk rapat koordinasi, pembuatan kesepakatan (memorandum of understanding), dan lain-lain tidak dapat dilakukan sehingga mengurangi penyerapan anggaran hidangan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2020**  
**(Belanja Langsung)**  
**s/d Bulan Juni**  
**BIRO TATA PEMERINTAHAN**

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisas	Deviasi	Target (Rp)	Target	Realisasi (Rp)	Realisasi	Deviasi				
4.3	1.12.15.004	Dukungan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	232.036.000	25,27	25,27	0,00	58.646.000	25,27	8.336.500	3,59	21,68	DIY	-	1. Sosialisasi program adminduk melalui media cetak dan elektronik : 1.1 cetak, elektronik dari 1.1 cetak, elektronik 2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Adminduk di Kab/kota : 0 orang dari 30 orang 3. Penyebarluasan program pemanfaatan data kependudukan bagi instansi/lembaga penyedia layanan publik : 0 lembaga dari 30 lembaga	<p>1. Kerjasama pegawai yang dolid 2. Perencanaan yang matang</p> <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Sosialisasi program adminduk melalui media cetak dan elektronik</p> <p>- terlaksananya koordinasi terkait rencana dan jadwal kegiatan tahun 2020</p> <p>- Terpubliksinya kegiatan Sosialisasi melalui media cetak surat kabar Radar Jogja</p> <p>- Terpublikasinya sosialisasi Pelayanan Terpadu melalui media elektronik RRI</p> <p>- Terpublikasinya informasi terkait pelayanan adminduk di masa covid melalui media cetak leaflet</p> <p>2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Adminduk di Kab/kota</p> <p>- terlaksananya koordinasi terkait rencana dan jadwal kegiatan tahun 2020</p> <p>- Terlaksananya koordinasi dengan Dinas Dukcapil Kab/Kota terkait pelayanan adminduk di tengah masa Covid-19</p> <p>3. Penyebarluasan program pemanfaatan data kependudukan bagi instansi/lembaga penyedia layanan publik</p> <p>- terlaksananya koordinasi terkait rencana dan jadwal kegiatan tahun 2020</p> <p>- Terlaksananya koordinasi terkait rencana sosialisasi prosedur dan tata cara pemanfaatan data di DIY</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Kegiatan pengumpulan massa tidak dapat dilakukan sehingga mengurangi penyerapan anggaran hidangan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> 1. Kerjasama antar pegawai yang solid 2. Perencanaan yang matang</p>
5	3.02.17	<b>PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>	267.595.000	78,61	78,61	0,00	176.881.000	66,10	134.563.000	50,29	15,81				
5.1	3.02.17.013	Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon, Kemantren dan Kalurahan	267.595.000	78,61	78,61	0,00	176.881.000	66,10	134.563.000	50,29	15,81	DIY	-	Hasil pembinaan penerapan Keistimewaan di Kalurahan, Kapanewon dan Kemantren : 0 Laporan dari 5 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Hasil Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kalurahan, Kapanewon dan Kemantren</p>



**Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2020**  
**(Belanja Langsung)**  
**s/d Bulan Juni**  
**BIRO TATA PEMERINTAHAN**

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisas	Deviasi	Target (Rp)	Target	Realisasi (Rp)	Realisasi				
														<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya KAK Pembinaan penerapan keistimewaan di Kapanewon, Kemantren dan Kalurahan</li> <li>- Terkoordinasikannya rencana operasional pelaksanaan pembinaan penerapan keistimewaan di Kapanewon, Kemantren dan Kalurahan</li> <li>- Terlaksananya sosialisasi regulasi kalurahan dalam konteks Keistimewaan di Kulon Progo</li> <li>- Terlaksananya sosialisasi regulasi kalurahan dalam konteks Keistimewaan di Sleman</li> <li>- Terlaksananya sosialisasi regulasi kalurahan dalam konteks keistimewaan DIY di Kabupaten Gunungkidul</li> <li>- Terlaksananya sosialisasi regulasi kalurahan dalam konteks keistimewaan DIY di Kabupaten Bantul</li> <li>- Terlaksananya koordinasi persiapan pelantikan dan pengukuhan Lurah se Kabupaten Gunungkidul</li> <li>- Terlaksananya pelantikan pengukuhan Lurah se Kabupaten Gunungkidul melalui video conference</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi Pergub no.1 Tahun 2020 tentang keistimewaan/perubahan nomenklatur desa tidak dapat dilakukan dengan tatap muka secara langsung mulai Bulan Maret sehingga mengurangi penyerapan anggaran makan-minum peserta - Sinkronisasi jadwal pelaksanaan sosialisasii dengan agenda pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Sleman - Sinkronisasi jadwal pelaksanaan sosialisasi dengan narasumber pusat (efisiensi)</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2020**  
**(Belanja Langsung)**  
**s/d Bulan Juni**  
**BIRO TATA PEMERINTAHAN**

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisas	Deviasi	Target (Rp)	Target	Realisasi (Rp)	Realisasi					Deviasi
														Hasil Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kalurahan, Kapanewon dan Kemantren - dilaksanakannya koordinasi internal terkait kerangka acuan kerja sebagai dasar rencana kegiatan pembinaan penerapan kebijakan dan regulasi terkait kalurahan dalam konteks kesitimewaan DIY - dilaksanakannya rapat koordinasi untuk penelarasan pemahaman terhadap Pergub 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan sebagai dasar penyampaian sosialisasi - tersampainya kebijakan dan regulasi terkait kalurahan dalam konteks keistimewaan DIY melalui sosialisasi yang telah dilaksanakan di Kulon Progo dan Sleman - - tersampainya kebijakan dan regulasi terkait kalurahan dalam konteks keistimewaan DIY melalui sosialisasi yang telah dilaksanakan di Gunungkidul di Sejumlah 144 Desa dan 75 Desa di Kabupaten Bantul - Komitmen tim tenaga ahli penyusun regulasi kalurahan untuk mendampingi pelaksanaan sosialisasi - Koordinasi dan kerjasama yang baik dari Dinas PMD Kabupaten Gunungkidul dan Bantul untuk memaparkan materi terkait respon masing-masing Kabupaten berkaitan dengan kebijakan dan regulasi kalurahan pada konteks keistimewaan DIY - proses	
6	3.04.15	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN</b>	294.850.000	8,50	8,50	0,00	21.121.000	7,16	9.967.500	3,38	3,78				
6.1	3.04.15.001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	294.850.000	8,50	8,50	0,00	21.121.000	7,16	9.967.500	3,38	3,78	Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah	-	2. Verifikasi Usulan Pembakuan Nama Rupabumi dari Kabupaten/ Kota : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 1. Penataan Administrasi Wilayah Perbatasan dan Toponimi : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> A. Penataan Administrasi Wilayah Perbatasan dan Toponimi  - Koordinasi dengan Pemkab Kulon Progo, Pemkab Sleman, Pemkab Purworejo, Pemkab Magelang dan Pemprov Jateng dalam rangka fasilitasi pembahasan penarikan jalur batas daerah perbatasan DIY Jateng. - Koordinasi dengan Kemendagri dalam rangka usulan pembahasan revisi Permendagri batas DIY-Jateng dan monitoring implemntasi permendagri batas daerah antar kabupaten/kota se DIY.  B. Toponimi Komplek Kepatihan - Koordinasi dengan OPD terkait rencana penyusunan kajian Toponimi Kepatihan.

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2020**  
**(Belanja Langsung)**  
**s/d Bulan Juni**  
**BIRO TATA PEMERINTAHAN**

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisas	Deviasi	Target (Rp)	Target	Realisasi (Rp)	Realisasi				
														<b>Faktor Penghambat:</b> 1. perubahan kode rekening pada belanja jasa konsultasi. 2. Koordinasi tatap muka tidak dapat dilaksanakan karena kondisi darurat bencana non alam ( covid 19) sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran. <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Koordinasi internal bagian solid 2. Koordinasi dengan BPKA dan Paniradyo Kaistimewaan. 3. Koordinasi dilakukan secara daring. 4. Surat Kepala Biro Tata Pemerintahan Nomor 903/01053 tanggal 1 April 2020 hal izin penundaan pertanggungjawaban SP2D TU, adapaun belanja yang dimintakan izin penundaan sebesar Rp. 8.654.500 berupa rapat-rapat koordinasi dan koordinasi dalam dan luar daerah ( perjadin)
7	4.01.22	<b>PROGRAM PEMBINAAN OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA</b>	523.338.500	71,02	71,02	0,00	369.886.500	70,68	309.110.950	59,07	11,61			
7.1	4.01.22.001	Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan	272.985.500	65,00	65,00	0,00	177.177.500	64,90	126.401.950	46,30	18,60	DIY	-	3. Rekomendasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan : 0 Rekomendasi tentang dari 1 Rekomendasi tentang 1. Laporan Standar Pelayanan Minimal 6 Bidang SPM : 1 Laporan Standar Pela dari 1 Laporan Standar Pela 2. LPPD Tahun 2019 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen  <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Laporan Standar Pelayanan Minimal 6 Bidang SPM - Terbentuknya TIM penyusun SPM - Tersusunnya laporan SPM 2. LPPD Tahun 2019 - Terbentuknya tim penyusun LPPD - Tersusunnya instrumen penyusunan LPPD - Tersedianya data / bahan penyusunan LPPD - Terlaksananya verikasi data LPPD - Terlaksananya Review LPPD Tahun 2019 - Tersusunnya LPPD Tahun 2019 - Tindak Lanjut Hasil Review LPPD Tahun 2019 - Uji Coba/Pilot Project Aplikasi E-LPPD oleh Ditjen Otda  3. Terbentuknya Tim Penyelesaian Permasalahan Urusan -Teridentifikasinya Permasalahan Urusan -Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Urusan -Tindak Lanjut Kesepakatan Terhadap Penyelesaian Permasalahan Urusan

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2020**  
**(Belanja Langsung)**  
**s/d Bulan Juni**  
**BIRO TATA PEMERINTAHAN**

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisas	Deviasi	Target (Rp)	Target	Realisasi (Rp)	Realisasi					Deviasi
						0,00								<p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. LPPD -E-LPPD masih dalam proses penyempurnaan -Data yang sudah dientri dalam E-LPPD tidak muncul dalam aplikasi</p> <p>2. Urusan - Penyelesaian permasalahan urusan belum menjadi prioritas dari pihak-pihak yang terkait sehingga tertutup oleh tugas-tugas/kegiatan yang lain -Perlu klarifikasi/verifikasi/penelusuran terhadap data-data aset sehingga memerlukan waktu yang lama</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. LPPD -Ditjen Otda terbuka terhadap masukan dari Daerah terkait Penyempurnaan Aplikasi E-LPPD 2. Urusan - Adanya komitmen dari pihak-pihak terkait untuk penyelesaian permasalahan urusan</p>	
7.2	4.01.22.003	Penanganan Kerjasama Dalam Negeri	250.353.000	77,58	77,58	0,00	192.709.000	76,97	182.709.000	72,98	3,99	Pemerintah Propinsi di Indonesia yang bekerjasama dengan Pemda DIY	-	1. Naskah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri : 0 Naskah Perjanjian Ke dari 5 Naskah Perjanjian Ke	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Naskah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya Tim Koordinasi Kerjasama Daerah / TKKSD</li> <li>- Tersusunnya draf naskah KSB / PKS</li> </ul> <p>2. Surat Keputusan Bersama (SKB) Gubernur Anggota FKD-MPU</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terkoordinasikannya info tentang rencana pelaksanaan dan detail kegiatan MPU</li> <li>- Tersusunnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Gubernur Anggota FKD - MPU</li> </ul> <p>3. Rekomendasi Hasil Monev Kerjasama Dalam Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teridentifikasinya permasalahan - permasalahan dalam penyelenggaraan kerjasama</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p>

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2020  
(Belanja Langsung)  
s/d Bulan Juni  
BIRO TATA PEMERINTAHAN**

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisas	Deviasi	Target (Rp)	Target	Realisasi (Rp)	Realisasi				
														<p>1. Masih banyak instansi - instansi yang belum menggunakan PP 28/2018 sebagai dasar penyusunan naskah kerjasama, contohnya Kanwil Kemenkumham DIY yang mengacu Permen 65/2016, oleh karena itu harus segera dilakukan penyesuaian persepsi terlebih dahulu agar kedepan pelaksanaan kerjasama ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak tumpang tindih. 2. Konsep kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang disebut dengan nama sinergi perencanaan pelaksanaan pembangunan, belum begitu diketahui oleh instansi - instansi yang selama ini mengajukan permohonan kerjasama ke Biro Tata Pemerintahan Setda DIY 3. Pelaksanaan penyelenggaraan RAKOPMDA APPSI Wilayah Regional Jawa, Bali, dan NTB yang rencana akan dilaksanakan di DIY pada tanggal 19 Maret 2020 di tunda karena ada kasus COVID 19 / virus corona 4. Pelaksanaan koordinasi penyusunan naskah kerjasama banyak terkendala karena physical distancing pada kondisi pandemi corona saat ini. 5. Dengan munculnya permendagri baru tentang kerjasama nomor 22 tahun 2020 maka perlu banyak penyesuaian dalam penyusunan naskah kerjasama.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2020**  
**(Belanja Langsung)**  
**s/d Bulan Juni**  
**BIRO TATA PEMERINTAHAN**

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisas	Deviasi	Target (Rp)	Target	Realisasi (Rp)	Realisasi					Deviasi
														1. Demi kelancaran pelaksanaan penyusunan kerja sama maka Biro Tata Pemerintahan Setda DIY telah membentuk TKKSD / Tim Koordinasi Kerjasama Daerah, yang terdiri dari instansi yang mewakili semua asisten di Pemda DIY 2. Instansi - instansi yang telah mengajukan permohonan pelaksanaan kerjasama, bersedia untuk mengikuti alur dan tata cara yang dilaksanakan oleh Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, yaitu mengacu pada PP 28/2018 sebagai dasar penyusunan naskah kerjasamanya. 3. Instansi yang telah mengajukan permohonan kerjasama mau menunda sampai kasus virus corona / COVID 19 mereda dan situasi kondusif kembali. 4. Tim TKKSD dan instansi pengusul kerjasama sudah mulai mau untuk rapat online melalui vcon zoom ataupun google meet untuk menyiasati physical distancing. 5. Beberapa instansi sudah bersedia untuk melakukan koordinasi langsung, jadi lebih efisien waktu karna dengan berinteraksi langsung akan lebih cepat menemukan solusi dalam memecahkan suatu permasalahan dalam penyusunan naskah	
8	4.01.23	<b>PROGRAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN, DAN KECAMATAN</b>	435.551.000	33,40	33,40	0,00	131.156.000	30,11	66.553.500	15,28	14,83				
8.1	4.01.23.002	Pembinaan Aparatur Desa/Kelurahan dan Kecamatan	326.918.000	28,25	28,25	0,00	86.293.000	26,40	45.985.500	14,07	12,33	DIY	-	<p>3 Desa dengan Aparatur yang Terbina dalam Pengelolaan Dokumen Administrasi Pemdes : 5 desa dari 5 desa</p> <p>2. Desa dengan BPD yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Penyelenggaraan Musdes : 5 desa dari 5 desa</p> <p>4. Kecamatan dengan Aparatur yang Terbina sebagai Pembina Teknis Pemerintah Desa : 3 kecamatan dari 3 kecamatan</p> <p>1. Desa yang Terdampingi dalam Penyusunan APBDesa Pro Poor : 5 desa dari 5 desa</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Desa dengan BPD yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan musyawarah desa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya Kerangka Acuan Kerja Subkegiatan Pemberdayaan Peran BPD dalam Penyelenggaraan musyawarah desa</li> <li>- Terkoordinasikannya rencana operasional pelaksanaan sub kegiatan Pemberdayaan Peran BPD dalam Penyelenggaraan Musyawarah Desa</li> <li>- Terlaksananya pembinaan dalam upaya penguatan peran BPD sebagai mitra pemerintah desa dalam penyelenggaraan musyawarah desa.</li> </ul> <p>2. Desa yang terdampingi dalam penyusunan APBDesa Pro Poor</p>

Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2020  
(Belanja Langsung)  
s/d Bulan Juni  
BIRO TATA PEMERINTAHAN

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisas	Deviasi	Target (Rp)	Target	Realisasi (Rp)	Realisasi				
														<p>- Terkoordinasikannya rencana operasional pelaksanaan refleksi hasil pendampingan penyusunan rancangan APBDesa Pro Poor tahun sebelumnya</p> <p>- Terlaksananya refleksi hasil pendampingan penyusunan Rancangan APBDesa Pro Poor yang telah disusun oleh kelima desa kategori tertinggal di Gunungkidul dan</p> <p>3. Desa dengan aparatur yang terbina dalam pengelolaan keuangan desa</p> <p>- Terkoordinasikannya penerapan pemahaman aparatur penyelenggara pemerintahan desa terhadap pengalolaan keuangan desa dalam masa pandemi covid-19 melalui koordinasi media sosial.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. Kegiatan pembinaan teknis administrasi pengelolaan keuangan desa yang rencananya dilaksanakan bulan ke empat bulan Maret karena ada bencana non alam sehingga belum bisa dilaksanakan 2. Dalam pelaksanaan pembinaan anggota BPD cukup kritis dan lebih menitikberatkan pada tuntutan atas hak mereka dalam skema keistimewaan DIY. 3. Sehubungan dengan masa tanggap darurat , pembinaan teknis terkait pengelolaan keuangan desa tidak bisa dilaksanakan. Sehingga terkait keuangan desa, koordinasi bersifat himbauan kepada aparatur pemdes untuk mengikuti kaidah perubahan Alokasi APBDesa, seperti alokasi Dana Desa untuk pennagulangan covid-19</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2020**  
**(Belanja Langsung)**  
**s/d Bulan Juni**  
**BIRO TATA PEMERINTAHAN**

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisas	Deviasi	Target (Rp)	Target	Realisasi (Rp)	Realisasi					Deviasi
														1. Desa dengan BPD yang meningkatkan kapasitasnya dalam penyelenggaraan musyawarah desa - dilaksanakannya rapat koordinasi pembahasan roadmap pelaksanaan pembinaan BPD dalam musyawarah desa dan pemetaan jadwal pelaksanaannya sebelum pembinaan dilakukan. - terlaksananya rapat kerja pembinaan Badan Pemusyawaratan Desa dalam Musyawarah Desa. Menghadirkan pemateri dari akademisi dan organisasi IDEA sebagai upaya penguatan dengan lokus penggalian aspirasi masyarakat oleh BPD dengan skema keberpihakan pada kelompok rentan. 2. Desa yang terdampingi dalam penyusunan APBDesa Pro Poor - . Kesiapan dan komitmen Kepala Desa dari Ketiga Desa di Kulon Progo dan 2 Desa di Gunungkidul untuk memaparkan hasil pendampingan penyusunan perencanaan berbasis pro poor. - Kesenambungan konten dengan pemateri dari IDEA terkait validitas data di level desa sebagai database untuk menyusun program perencanaan pembangunan desa berbasis kelompok	
8.2	4.01.23.003	Koordinasi, Monitoring, dan, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kecamatan	108.633.000	48,90	48,90	0,00	44.863.000	41,30	20.568.000	18,93	22,36	DIY	-	1. Pemantauan Kinerja Kecamatan : 0.5 Laporan dari 1 Laporan 2. Pemantauan Pengelolaan Dana Desa : 0.5 Rekomendasi dari 1 Rekomendasi	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Pemantauan Pengelolaan Dana Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terkoordinasikannya penyusunan kerangka acuan kerja kegiatan pemantauan hasil pengelolaan dana desa</li> <li>- Tersusunnya Kerangka Acuan Kerja Pemantauan Hasil Pengelolaan Dana Desa</li> <li>- Terkoordinasikannya peninjauan permasalahan pengelolaan dana desa</li> <li>- Sehubungan dengan masa tanggap darurat maka koordinasi monitoring dan evaluasi terkait dana desa melalui pemantauan media sosial. Dalam hal ini fokus pada perubahan alokasi DD untuk pemberian Bantuan Langsung Tunai</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p>



**Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2020**  
**(Belanja Langsung)**  
**s/d Bulan Juni**  
**BIRO TATA PEMERINTAHAN**

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisas	Deviasi	Target (Rp)	Target	Realisasi (Rp)	Realisasi	Deviasi					
																1. Kegiatan ekspose konsolidasi hasil pengelolaan desa yang direncanakan dilaksanakan pada minggu terakhir bulan Maret tidak dapat dilaksanakan karena ada bencana non alam 2. Dalam pelaksanaan rakor tentang PMK 205/2019, terdapat beberapa hal yang masih menunggu kebijakan dari kementerian keuangan, terkait prosentase target yang harus dicapai oleh status desa mandiri yang dinilai tidak sebanding dengan kategori desa lainnya. - Penyerahan Data hitungm besaran BLT Dana Desa sedikit terhambat dikarenakan ada satu Kabupaten yang tidak tepat waktu menyerahkannya. <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Pemantauan Pengelolaan Dana Desa - dilaksanakannya rapat koordinasi penyamaan persepsi atas muatan PMK 205/2019 menghadirkan DJPb dan KPPN. - dilaksanakannya forum komunikasi untuk menjangkau berbagai permasalahan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk mendorong keberdayaan dan kemandirian desa dengan visi keistimewaan DIY.
9	4.01.24	PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PENATAAN WILAYAH	130.645.500	29,22	28,76	0,46	36.239.250	27,74	29.536.250	22,61	5,13					
9.1	4.01.24.001	Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	90.747.500	16,70	16,70	0,00	14.198.750	15,65	9.373.750	10,33	5,32	DIY	-	6. Rekomendasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah : 0 Rekomendasi dari 1 Rekomendasi 5. Laporan Monitoring Pelaksanaan Pilkada di 3 Kabupaten (Bantul, Sleman dan Gunungkidul) kepada Menteri Dalam Negeri : 0 Laporan dari 1 Laporan 4. Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Bantul, Gunungkidul, dan Sleman : 0 Laporan dari 1 Laporan 2. Berkas Usulan Pemberhentian, Pengangkatan Anggota DPRD Antar Waktu : 1 Usulan/ Draf SK dari 2 Usulan/ Draf SK	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Umum - Terbentuknya tim pemantauan pelaksanaan kebijakan pemerintahan umum - Tersusunnya KAK tenaga ahli dalam rangka pemantauan pelaksanaan kebijakan pemerintahan umum dengan tema kerawanan pilkada 2020 - Terkoordinasikannya tim pemantauan dan tenaga ahli dalam rangka identifikasi awal kerawanan pilkada 2020	

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2020**  
**(Belanja Langsung)**  
**s/d Bulan Juni**  
**BIRO TATA PEMERINTAHAN**

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisas	Deviasi	Target (Rp)	Target	Realisasi (Rp)	Realisasi				
														<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya koordinasi terkait kerawanan Pilkada 2020 di DIY dengan instansi Pemerintah terkait baik Pemerintah Daerah DIY maupun Kabupaten/Kota dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang fokus kegiatannya terkait dengan Pilkada/Pemilu</li> <li>- Kegiatan pemantauan pelaksanaan kebijakan pemerintahan umum tidak dilanjutkan berkaitan dengan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19</li> <li>2. Usulan Pemberhentian, Pengangkatan Anggota DPRD Antar Waktu <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbentuknya tim Pemberhentian, Pengangkatan Anggota DPRD Antar Waktu</li> <li>- Terkoordinasikannya masa tugas pansus DPRD Kulon Progo dan dinamika parpol dalam pemilihan Wakil Bupati Kulon Progo</li> <li>- Surat Gubernur DIY Nomor 270/5307 tanggal 24 maret 2020, hal Pemilihan Wakil Bupati Kulon Progo sebagai tindak lanjut atas surat Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo Nomor 171/5 tanggal 4 Maret 2020 perihal Masa Tugas dan Dinamika Parpol dalam Pemilihan Wakil Bupati Kulon Progo</li> <li>- Terkoordinasikannya status hukum anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul a.n. Sumaryanto</li> <li>- Terkoordinasikannya proses awal PAW anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul</li> <li>- Terkoordinasikannya Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 170/208 tanggal 11 Mei 2020 Perihal Usul Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD, Saudara SUMARYANTO dari Partai Gerindra diusulkan pemberhentian dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Periode 2019-2024 karena telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap digantikan oleh Saudara LAGIYO</li> <li>- Terverifikasinya data pendukung PAW anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul a.n. Lagiyo</li> </ul> </li> </ul>

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2020**  
**(Belanja Langsung)**  
**s/d Bulan Juni**  
**BIRO TATA PEMERINTAHAN**

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisas	Deviasi	Target (Rp)	Target	Realisasi (Rp)	Realisasi				
														<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya draft SK Gubernur Peresmian Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul</li> <li>- Terbitnya dan terdistribusikannya SK Gubernur Peresmian Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul</li> <li>- Terkoordinasikannya pelantikan Wakil Bupati Kulon Progo Sisa Masa Jabatan Tahun 2017-2022</li> <li>- Terlaksananya pelantikan Wakil Bupati Kulon Progo Sisa Masa Jabatan Tahun 2017-2022 oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020, pukul 09.00 WIB, bertempat di Gedhong Pracimasono, Kompleks Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta</li> </ul> <p>3. Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Pilkada</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbentuknya tim Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Pilkada</li> <li>- Koordinasi internal kemungkinan mundurnya pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang berdampak pada keluaran kegiatan ini</li> <li>- Kegiatan ini tidak dilanjutkan karena berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020, pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak 2020 diundur sampai dengan bulan Desember 2020</li> </ul> <p>4. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Bantul, Gunungkidul, dan Sleman</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya juknis penggunaan bantuan keuangan bersifat khusus untuk penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020</li> </ul> <p>5. Monitoring Pelaksanaan Pilkada di 3 Kabupaten (Bantul, Sleman dan Gunungkidul)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbentuknya tim Monitoring Pelaksanaan Pilkada di 3 Kabupaten (Bantul, Sleman dan Gunungkidul)</li> <li>- Terkoordinasikannya desk Pilkada di 3 Kabupaten (Bantul, Sleman dan Gunungkidul)</li> </ul>

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2020**  
**(Belanja Langsung)**  
**s/d Bulan Juni**  
**BIRO TATA PEMERINTAHAN**

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisas	Deviasi	Target (Rp)	Target	Realisasi (Rp)	Realisasi				
														<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi internal kemungkinan mundurnya pelaksanaan Pilkada serentak 2020</li> <li>- Terinformasikannya Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang. Sehingga berdampak pada mundurnya proses pelaksanaan Pilkada serentak 2020.</li> <li>6. Rekomendasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teridentifikasinya permasalahan penyelenggaraan pemerintahan daerah</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Koordinasi tatap muka tidak dapat dilaksanakan karena kondisi darurat bencana non alam ( covid 19) sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi antar instansi berjalan dengan baik dan komitmen tinggi terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing.</p>
9.2	4.01.24.002	Penataan Wilayah Administrasi Perbatasan dan Toponimi	39.898.000	57,70	56,20	1,50	22.040.500	55,24	20.162.500	50,54	4,71	DIY	-	<p>3. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten/ Kota tentang Penyelesaian Permasalahan di Wilayah Perbatasan Kabupaten/ Kota dan atau antar Provinsi di DIY : 0 Dokumen Kesepakatan dari 1 Dokumen Kesepakatan</p> <p>4. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten/ Kota DIY : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>A. Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi Perbatasan dan Toponimi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terinformasikannya kegiatan, output kegiatan, dan jadwal pelaksanaan masing-masing output kegiatan pada masing-masing Kab/Kota sebagai anggota Tim Pokja.</li> </ul> <p>B. Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/ kota di DIY :</p> <p>1. Penyusunan buku kode dan data administrasi wilayah pemerintahan Kab/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat Koordinasi Penyusunan buku kode dan data administrasi wilayah pemerintahan Kab/Kota di DIY tanggal 18</li> </ul>

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2020**  
**(Belanja Langsung)**  
**s/d Bulan Juni**  
**BIRO TATA PEMERINTAHAN**

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisas	Deviasi	Target (Rp)	Target	Realisasi (Rp)	Realisasi				
														<p>- Disampaikannya Surat Sekretaris Daerah DIY Nomor 125/00645 tanggal 24 Februari 2020, Hal : Permohonan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Tahun 2020</p> <p>- Data agar dikirmkan pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY paling lambat tanggal 28 Februari 2020 melalui email : bangwil.diy@gmail.com atau melalui surat resmi</p> <p>2. Diperolehnya Materi kebijakan dari pusat terkait penyusunan kode data wilayah</p> <p>- Informasi mengenai penyusunan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan DIY Tahun 2020 untuk tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.</p> <p>3. Tersusunnya buku kode dan data wilayah administrasi pemerintahan DIY tahun 2020.</p> <p>C. Hasil koreksi koordinat pilar batas wilayah DIY-Jateng secara geodetik. ( output tidak dilanjutkan)</p> <p>1. Penyusunan KAK pengadaan barang/jasa pengukuran geodetik pilar batas daerah DIY-Jateng.</p> <p>2. Koordinasi persiapan pengukuran geodetik pilar batas daerah DIY-Jateng.</p> <p>D. Database pilar batas untuk pengelolaan batas wilayah. ( output tidak dilanjutkan)</p> <p>1. Penyusunan KAK pekerjaan penyusunan database pilar batas untuk pengelolaan batas wilayah.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. Koordinasi tatap muka tidak dapat dilaksanakan karena kondisi darurat bencana non alam ( covid 19) sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2020**  
**(Belanja Langsung)**  
**s/d Bulan Juni**  
**BIRO TATA PEMERINTAHAN**

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisas	Deviasi	Target (Rp)	Target	Realisasi (Rp)	Realisasi	Deviasi					
																1. Koordinasi internal bagian solid 2. Tersedianya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. 3. Koordinasi dilakukan secara daring. 4. Output : 1. Database pilar batas untuk pengelolaan tanda batas wilayah, 2. Hasil koreksi koordinat pilar batas wilayah DIY-Jateng secara geodetik tidak dilanjutkan karena difocussing untuk penanganan pandemi Covid 19.
<b>Jumlah</b>			<b>3.540.200.500</b>	<b>56,87</b>	<b>56,86</b>		<b>1.974.159.050</b>	<b>55,76</b>	<b>1.456.655.951</b>	<b>41,15</b>						